KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 3 2 3				Final	
			H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
A. IDENTITAS PE	NERIMA PENGHASIL	AN YANG	DIPOTONG					
A.1 NPWP : 1 4 5 4 5 5 5 5 5 7 2 6 0 0 0								
A.2 NIK	:							
A.3 Nama	: JAYA MUALIMIN	I						
B. PPh PASAL 21	I YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4 21-402-01			42.535.700	42.535.700	0	15	6.380.355	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 037/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022								
Nama Dokumen			en Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor : Tanggal dd mm yyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah :			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4 Tanggal		1 3	dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy				
			HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak			Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya					
		tandata	ngani secara elektronik.					
			dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	s mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

K3Q1AGGI